



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Agustus 2024/Khusus - Calon PN)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
**UNIT KERJA** : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDISON
2. Jabatan : CALON BUPATI
3. NHK : 461991

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 14.180.192.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 719 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.274.068.000
2. Tanah Seluas 579 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 173.700.000
3. Tanah Seluas 2617 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 4.637.324.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 1277 m2 di KAB / KOTA KOTA PRABUMULIH , HASIL SENDIRI Rp. 383.100.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 16830 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 6.732.000.000
7. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
8. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 505.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000



2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2019, HASIL  
SENDIRI Rp. 380.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	705.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	500.000.000
Sub Total	Rp.	16.030.192.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 16.030.192.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Agustus 2024/Khusus - Calon PN)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
**UNIT KERJA** : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUMARNI**
2. Jabatan : **CALON WAKIL BUPATI**
3. NHK : **964810**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.009.800.000**

1. Tanah Seluas 12216.5 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 18720 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 16080 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 22162.5 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 2049 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 409.800.000
6. Tanah Seluas 10050 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
7. Tanah Seluas 628 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah Seluas 565 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 359.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 E CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



2. MOBIL, SUZUKI TM2FX (4X2) A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI  
Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000
4. MOTOR, VESVA P150X Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp.  
1.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>400.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>500.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>7.268.800.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>220.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>7.048.800.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YULIUS
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 53136

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.015.000.000</b>
1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, WARISAN Rp. 255.000.000		
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , WARISAN Rp. 760.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>245.000.000</b>
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
4. MOBIL, FORTUNER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000		
5. MOBIL, TOYOTA HILUX MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>18.750.000</b>
<b>D. SURAT BERTAGIH</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>87.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.365.750.000</b>



III. HUTANG

Rp. 114.567.829

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.251.182.171

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : HENKY PUTRAWAN
- Jabatan : KEPALA BIRO
- NHK : 882002

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	6.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 728 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , WARISAN Rp. 3.000.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	120.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	116.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	715.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.951.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	6.951.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.